

Ganjar: Waspada Rob Bulan Juni dan Juli

SEMARANG (IM)- Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo memperingatkan warga untuk waspada banjir air laut pasang (rob) bulan Juni dan Juli. Patroli terhadap tanggul pun harus dilakukan guna mengantisipasi banjir besar terulang kembali. "Berdasarkan data dari BMKG, pada bulan Juni dan Juli akan ada potensi gelombang tinggi lagi, saya minta Pemerintah Kota Pekalongan untuk waspada dan bersiap-siap," kata Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo usai mengunjungi ratusan pengungsi di Pekalongan, Sabtu (28/5) malam. Kewaspadaan tinggi untuk mengantisipasi terjadinya banjir besar terulang kembali, ucap Ganjar, dengan melakukan patroli di setiap tanggul sungai, sehingga ketika muncul gejala adanya kerusakan dapat segera dilakukan penanganan agar tidak sampai mengalami kerusakan parah.

Menyangkut tanggul yang jelek beberapa waktu lalu hingga menyebabkan banjir rob besar, Ganjar mengatakan telah ditangani dengan memperbaiki tanggul dan adanya tanggul darurat. "Sudah ditangani dan mendekati selesai, diminta untuk dipercepat agar segera selesai," tambahnya. Pembangunan tanggul besar sepanjang pantai utara Kabupaten dan Kota Pekalongan, lanjut Ganjar Pranowo, saat ini sedang berlangsung, sehingga seandainya pembangunan tersebut diharapkan akan dapat mengatasi banjir rob secara permanen di kedua daerah di pantura Jawa Tengah itu.

Banjir rob yang terjadi di Jawa Tengah saat ini tergolong paling besar dalam lima tahun terakhir, namun penanganan cepat dilakukan cukup baik oleh

pemerintah daerah hingga pusat. Kondisi warga di pengungsian juga mendapatkan perhatian khusus dan semua sehat.

"Alhamdulillah semua pengungsi sehat dan kebutuhan logistik terpenuhi baik, saya berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, termasuk juga warga terdampak," ujarnya.

Sementara itu berdasarkan pemantauan banjir rob di Pekalongan Minggu (29/5), sudah mulai surut dibandingkan sebelumnya. Sejumlah warga di beberapa wilayah mulai terlihat melakukan pembersihan lumpur dan sampah di lingkungan dan rumah mereka agar kembali dapat ditempati. Namun ratusan pengungsi di beberapa titik masih bertahan karena selain lingkungan masih terendam dengan ketinggian sekitar 30-50 sentimeter (menurun dari sebelumnya hingga 1,2 meter), pengungsi juga masih khawatir muncul banjir lagi.

"Belum kering dan masih ada yang banjir, kami khawatir datang lagi rob besar jadi kami bertahan di sini," kata Haryati (55), pengungsi di Tirta, Kota Pekalongan.

Wali Kota Pekalongan, Achmad Afizan Arslan Djunaid secara terpisah mengatakan seluruh pengungsi mendapatkan pelayanan terbaik, selain terpenuhi kebutuhan logistik dan obat-obatan. Pemkot Pekalongan juga menurunkan tim kesehatan serta tempat pengungsian yang memadai. Sedangkan bantuan untuk warga terdampak yang masih bertahan di rumah juga terus disalurkan. Dapur umum pun menyediakan ribuan makanan siap saji dibagikan kepada warga. • **pra**

8 | Nusantara



IDN/ANTARA

BUS WISATA UNCAL BOGOR KEMBALI BEROPERASI

Sejumlah warga antre naik bus wisata Uncal di depan Balai Kota Bogor, Jawa Barat, Minggu (29/5). Pemerintah Kota Bogor kembali mengoperasikan layanan bus wisata Uncal secara gratis kepada masyarakat luas setiap akhir pekan pasca melandainya pandemi COVID-19.

PEMBANGUNAN RSUD BOGOR UTARA

Asep Wahyuwijaya: Jika tak Mampu Serahkan Saja ke Pemprov

Jika memang Pemkab Bogor tak mampu menyiapkan anggaran yang maksimal untuk pembangunan RSUD Bogor Utara sebaiknya Pemkab Bogor serahkan saja ke Pemprov Jawa Barat. Insha Allah cepat selesai. Tak harus merasa gengsi atau malu, hal ini biasa kok, kata anggota DPRD Jabar, Asep Wahyuwijaya.

PARUNG (IM)- Legi- slator Partai Demokrat yang duduk di Komisi V DPRD Jawa Barat, Asep Wahyuwijaya berkomentar lugas atas usulan permohonan bantuan keuangan (Bankeu) ke Pemprov Jawa Barat sebesar Rp 230 Miliar untuk penyelesaian pembangunan tahap dua (Gedung C) RSUD Bogor Utara.

Jika memang tak mampu, baik dari sisi anggaran maupun sisi teknis. Asep Wahyuwijaya meminta Pemkab Bogor menyerahkan sepenuhnya pembangunan RSUD Bogor Utara ke Pemprov Jawa Barat. "Menurut hemat saya, jika

memang Pemkab Bogor tak mampu menyiapkan anggaran yang maksimal untuk pembangunan RSUD Bogor Utara sebaiknya Pemkab Bogor serahkan saja ke Pemprov Jawa Barat. Insha Allah cepat selesai. Tak harus merasa gengsi atau malu, hal ini biasa saja kok, dulu saja Pemkab Garut pernah melakukan hal yang sama ketika tidak sanggup membiayai RSUD Pameungpeuk pada tahun 2015 dan Pemkab Sukabumi yang mengalihkan pengelolaan RSUD Jampang Kulon ke Pemprov Jabar pada tahun 2016," papar Asep Wahyuwijaya kepada wartawan, Minggu (29/5).

Asep Wahyuwijaya menjelaskan

kan bahwa secara garis besar ada beberapa argumen yang mendasari usulan pengalihan pengelolaan RSUD Bogor Utara dari Pemkab Bogor ke Pemprov Jawa Barat.

"Pertama, menyiapkan infrastruktur kesehatan sebagai wujud dari komitmen memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal kepada warga di Kabupaten Bogor ini tak boleh ditunda-tunda lagi karena jumlaharganya semakin bertambah banyak hingga semakin kekurangan tempat tidur di rumah sakit," jelas Asep Wahyuwijaya.

Kang AW sapaan pria yang memiliki background sebagai advokat tersebut memabahkan, jika merujuk pada standar word health organization (WHO) maka jumlah ideal tempat tidur di rumah sakit sangatlah kurang.

"Jumlah tempat tidur di rumah sakit di Bumi Tegar Beriman baru mencapai 3.500-an, artinya ada 2,5 juta warga di Kabupaten Bogor yang sesungguhnya berpotensi tidak mendapatkan perawatan jika mereka sakit, sehingga konsekuensinya bisa kita lihat dari panjangnya antrian saat

pasien harus dirawat di rumah sakit," tambahnya.

La menuturkan, dengan beban atau kebutuhan anggaran pembangunan rumah sakit yang begitu besar dengan nilai minimal Rp 600 Miliar hingga Rp 1 Triliun, maka tak elok jika dibebankan dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Kabupaten Bogor.

"Jika semua kebutuhan anggaran pembangunan RSUD Bogor Utara itu dibebankan kepada APBD Kabupaten Bogor, maka pembangunan sektor lain tidak bisa dipenuhi, meskipun pengajuannya dilakukan secara multi-years (tahun jamak). Lalu ketiga, sesuai dengan hasil revisi rencana pembangunan jangka menengah daerah (RJMD) Jawa Barat 2021 kemarin, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil beberapa waktu yang lalu pun sudah menyampaikan bahwa Pemprov Jabar akan membangun banyak rumah sakit dan Puskesmas, jadi saya pikir momentumnya jadi tepat juga," tutur Kang AW.

La optimistis, kalau saja pembangunan RSUD Bogor Utara diambil alih oleh Pem-

prov Jawa Barat tidak akan mengalami kendala dari sisi anggaran dan pembangunan pun akan cepat karena sesuai dengan amanah RPJMD Jawa Barat, bahwa skala prioritas pembangunan Pemprov Jawa Barat pasca pandemi Covid-19 ialah pembangunan rumah sakit dan Puskesmas.

Sebelumnya, Pemprov Jawa Barat berupaya meningkatkan akses pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat. Termasuk terkait pembangunan infrastruktur kesehatan.

"Belajar dari pengalaman dan pelajaran penting dari adanya pandemi Covid-19, kami akan membangun puluhan rumah sakit dan ribuan Puskesmas baru sebagai infrastruktur kesehatan untuk melayani masyarakat," ucap Ridwan Kamil. Mantan Wali Kota Bandung itu mengaku, berkaca pada pandemi Covid-19 dan agar dapat memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat Jawa Barat secara optimal maka diperlukan tersedianya infrastruktur kesehatan yang lebih banyak. • **gio**

KEMBALI USULKAN PMP

PPJ Ngaku Sudah Menempuh

Prosedur Administrasi dan Legalitasnya

BOGOR (IM)- Perusahaan Umum Daerah (Perumd) Pasar Pakuan Jaya (PPJ) Kota Bogor kembali mengajukan Penyertaan Modal Pemerintah (PMP). Kali ini PPJ melakukan langkah sesuai prosedur administrasi dan secara legalitas yang ditempuh dengan baik. Diketahui sebelumnya PMP Perumd PPJ Kota Bogor yang diajukan akhir tahun 2021 ditolak DPRD Kota Bogor pada 8 Maret 2022 lalu. "Untuk PMP PPJ kami usulkan kembali, jadi tahapannya kami sudah komunikasi dengan Badan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Bogor untuk meminta arahan seperti apa pengajuan PMP ini," ungkap Direktur Umum (Dirum) PPJ Kota Bogor, Jenal Abidin, Minggu (29/5).

Jenal melanjutkan, kemudian yang kedua pihaknya juga sudah berkomunikasi dengan Bagian Hukum Pemkot Bogor, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dan bagian ekonomi Pemkot Bogor agar PMP yang diajukan PPJ bisa disetujui.

"Karena ini untuk mengembangkan bisnis baru Perumd PPJ dan juga tujuannya meningkatkan pelayanan juga otomatis meningkatkan pendapatan. Utamanya pelayanan bagi masyarakat ditingkatkan," terangnya.

Jenal memaparkan, untuk bisnis plan sudah selesai dan sudah disampaikan juga ke teman-teman BKAD Kota Bogor. Tim BKAD Kota Bo-

gor juga sudah merespon baik dan sudah melakukan kajian investasi untuk proses PMP.

"Alhamdulillah, mudah-mudahan dalam Minggu ini atau Minggu depan surat permohonan sudah masuk ke DPRD Kota Bogor. Alhamdulillah, sampai saat ini kendala belum ditemui dan sudah melakukan langkah sesuai prosedur administrasi dan secara legalitas ditempuh dengan baik," paparnya.

Jenal menjelaskan, kebanyakan yang diajukan atau dimohonkan adalah aset tanah dan bangunan, di antaranya yang dimohonkan yaitu Plaza Bogor, ada lahan dekat tamanencana dan pasar Jambu Dua. Ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan.

"Untuk lahan di Jambu Dua kami akan tingkatkan pelayanan bagi pedagang eksisting dengan penambahan lahan nanti. Beberapa perencanaan kami ada tempat juga nanti di Jambu Dua. Pasar Jambu dua akan dilakukan beauty content yang dimulai apabila PMP nanti disetujui. Sukasari juga akan direvitalisasi, mudah-mudahan bisa tahun ini agar pelayanan maksimal. Saat ini pedagang ada di TPS Sangala. Nanti dirobahkan dan baru dibangun," jelasnya.

Diketahui, PMP PPJ ini berupa uang Rp5 miliar. Sisanya aset berupa lahan, aset tanah dan bangunan dengan nilai kurang lebih Rp280 miliar yang terdiri dari pasar Jambu Dua, pasar Taman Kencana dan Plaza Bogor. • **gio**

IDN/ANTARA



EKOWISATA HUTAN MANGROVE DI SINJAI

Pengunjung melintas di area hutan mangrove Tongke-Tongke di Desa Tongke-Tongke, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, Minggu (29/5). Hutan mangrove dengan luas sekitar 173,5 hektare tersebut menjadi salah satu destinasi ekowisata yang ramai dikunjungi wisatawan saat libur akhir pekan.

Vandalisme di Kota Solo tak

Terkontrol, Gibran: Terkendala CCTV

SOLO (IM)- Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka mengaku fasilitas Smart City di Kota Solo, Jawa Tengah, belum sepenuhnya efektif diterapkan. Hal itu merujuk beberapa pengawasan fasilitas umum yang rusak bahkan hilang, karena terkendala resolusi CCTV kurang memadai. "Kurang efektif iya, harus ada penambah hardware-hardware, kamera-kamera yang resolusinya tinggi," kata Gibran Rakabuming Raka, Sabtu (28/5) malam. "Iya ada fasilitas belum memadai. Belum dianggarkan saja," lanjutnya. Ditambah lagi menurutnya, hingga kini, beberapa kasus vandalisme di Kota Solo, belum sepenuhnya ditangkap. Misalnya, Fly Over Manahan dan Fly Over Purwasari menjadi korban vandalisme yang hingga kini para pelakunya belum tertangkap. Bahkan lampu taman sebanyak 32 unit berentuk minatur Tugu Makutha Solo di tepi sepanjang Jalan Adi Sucipto, Kota Solo,

Jawa Tengah, juga hilang. "Ya memang beberapa fasilitas umum banyak yang dirusak, fly over juga rusak dicoret-coret. Mungkin kita tingkatkan lagi pemangannya. Penambahan CCTV penting banget," jelasnya.

Upaya penambahan fasilitas tetap akan ditingkatkan Pemerintah Kota (Pemkot) Solo, agar tidak terjadi kerusakan atau perilaku yang serupa. "Rencananya di penganggaran berikutnya, tahun depan. Karena vandalisme sudah tidak terkontrol lagi," tegas Gibran.

Diberitakan sebelumnya, Pemkot menerapkan sistem pelayanan publik berbasis emergency command center yang bernama Solo Smart City. Penerapan Sistem Solo Smart City dengan Aplikasi Solo Destinasi yang terpusat Traffic Management Center (TMC) di Jalan Slamet Riyadi, Laweyan, Kota Solo, Jawa Tengah. Sistem ini, terintegrasi aplikasi Eling Solo yang terhubung 68 CCTV di Kota Solo. • **pra**

Disparbud dan BPPD Kab. Bogor Pasarkan Pariwisata ke Ambon

AMBON (IM)- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Diparbud) bersama Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Kabupaten Bogor melakukan kegiatan pemasaran pariwisata ke Ambon, Maluku.

Rombongan pelaku institusi pariwisata dari Kabupaten Bogor itu, menggelar sales mision "Table Top" yang mendapat sambutan dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparbud) Provinsi Ambon, Maluku.

Kegiatan ini di gelar Hotel Amaris, Ambon, Maluku, kemarin.

Selain mempresentasi destinasi wisata juga memasarkan 11 lapangan golf kelas Internasional. Karenanya, warga Ambon Maluku diajak berkunjung Kabupaten Bogor dengan destinasi alam nan asri dan sementara bagi pehobi golf

ditunggu kedatangannya.

Karena itu, dalam waktu dekat, kerjasama ini akan dilanjutkan dengan balasan kunjungan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Maluku ke Kabupaten Bogor. Hal disampaikan Kadis Parkraf, Profesor Markus, saat membuka Sales Mission "Table Top" yang digelar BPPD Kabupaten Bogor.

"Kami menyambut baik atas kunjungan Disparbud dan BPPD Kabupaten Bogor, segera kami akan kunjungan balik ke Kabupaten Bogor," kata Kadisparkref yang belatar belakang dosen dan juga sebagai alumnus IPB Dramaga, Kabupaten Bogor.

Menurutnya, awal mula pihaknya mendapat surat Diparbud dan BPPD Kabupaten Bogor, langsung gembira bahkan segera dibalas. "Saya

langsung menganggap orang Bogor sebagai saudara saya," ujar Petrus dengan logat kalem penuh keakraban.

Sementara itu, Kadisparkref, Deni Humaidi dan Ketua BPPD Kabupaten Bogor, DR Lucky Hikmat Maulana SE Msi, berterima kasih atas sambutan dari Disparbud Provinsi Maluku. "Terima kasih pak Kades atas sambutan luar biasa dari teman-teman Disparbud," papar Lucky seraya, menambahkan pihaknya mengundang untuk berkunjung balik ke Kabupaten Bogor.

Sedangkan peserta sales mision "Table Top" cukup antusias di mana dihadiri sejumlah undangan pelaku usaha pariwisata dan UMKM Ambon, Maluku.

Mereka juga melakukan pameran UMKM di Table Top yang digelar di Htel Amaris, Ambon, Maluku. • **gio**



IST

Kadisparkref Ambon, Prof DR Ir Max Marcus J. Pattinama, bersama BPPD dan Disparbud Kabupaten Bogor.

Wanita Tua di Empang Bogor Diduga Dibuang Keluarganya

BOGOR (IM)- Seorang wanita paruh baya diduga dibuang oleh keluarganya di Jalan Sadane, Kelurahan Empang, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Saat ini, wanita tersebut sudah ditangani di Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor.

Kasubsi Penmas Polresta Bogor Kota, Iptu Rachmat Gumilar menjelaskan, wanita tersebut ditemukan pada Jumat (27/5) oleh warga sekitar. Warga kemudian melaporkan hal tersebut ke Polsek Bogor Selatan. "Jadi Polsek Bogor Selatan mendapatkan informasi melalui WhatsApp, ada seseorang wanita paruh baya yang diduga telah dibuang oleh keluarganya sejak Jumat (27/5)," kata Rachmat, kemarin.

La menjelaskan, wanita tersebut pada Jumat pagi hanya tidur-tiduran di Jalan Sadane. Kemudian pada sore hari, warga setempat memberi makan wanita tersebut sehingga bisa bangun dan duduk.

Setelah itu, sambung Rachmat, warga melaporkan ke Polsek Bogor Selatan. Pihak Polsek kemudian membawa si wanita ke Dinsos Kota Bogor untuk penanganan lebih lanjut. Rachmat memastikan wanita itu bukan pengemis atau gelandangan. Namun, diduga dibuang oleh keluarganya.

"Bukan (pengemis atau gelandangan). Tidak diketahui tahu sudah ada di lokasi sejak Jumat pagi diketahui sejak sore keluarganya sejak Jumat (27/5)," kata dia. • **gio**

Perumda Tirta Kahuripan Sensus Pelanggan di Bogor Hingga Juni 2022

KABUPATEN BOGOR (IM)- Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor, Jawa Barat, melakukan sensus pelanggan di wilayahnya pada April-Juni 2022. Sensus ini dilakukan guna memperbaiki data sebagai dasar proses digitalisasi serta peningkatan layanan. "Untuk memperbarui dan melengkapi informasi pelanggan sebagai data dasar dalam proses digitalisasi pelanggan," ungkap Direktur Umum Perumda Air Minum Tirta Kahuripan, Abdul Somad di Bogor, Sabtu (28/5).

Menurut dia, sensus kepada sekitar 165 ribu pelanggan ini dilakukan oleh 203 enumerator atau petugas sensus dengan dilengkapi surat tugas dan kartu identitas. "Enumerator akan melaksanakan tugasnya sesuai dengan jumlah dan lokasi yang telah ditetapkan, petugas akan datang dari rumah ke rumah," katanya.

Somad menyebutkan, petugas sensus akan menanyakan beberapa data kepada pelanggan dan mendokumentasikan foto rumah sebagai data pendukung

serta menempelkan stiker sebagai tanda bahwa rumah pelanggan tersebut telah disensus. Ia juga menyiapkan alternatif sensus secara digital, yaitu menggunakan tautan <https://bit.ly/sensus-pelangganirtakahuripan>. Melalui tautan tersebut, pelanggan yang belum bisa diwawancara secara langsung bisa ikut berpartisipasi.

Sensus pelanggan air bersih ini, kata Somad, sebagai langkah awal untuk mengidentifikasi kebutuhan utama pelanggan atas pelayanan air bersih yang dilakukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bogor ini. Kemudian, pihaknya akan membandingkan dengan pelayanan yang diterima pelanggan dan menjadikan hasil sensus selama dua bulan tersebut sebagai dasar perencanaan strategis agar lebih tepat sasaran ke depannya.

"Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor dituntut untuk dapat memberikan pelayanan prima dan untuk mencapai tujuan tersebut diharuskan mengetahui karakteristik dan kebutuhan pelanggan," kata Somad. • **gio**